

**2023**



# **LAPORAN KINERJA**

# Kata Pengantar

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2023 disusun berdasarkan Perjanjian Kinerja Tahun 2023. LKjIP Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2023 merupakan bentuk akuntabilitas publik dari pelaksanaan tugas dan fungsi dan penggunaan anggaran yang dipercayakan kepada setiap instansi pemerintah. Penyusunan LKjIP Tahun 2023 diwarnai agenda *refocusing* dan realokasi anggaran. Sumber Daya yang dimiliki Pemerintah Daerah difokuskan untuk menjamin ketersediaan dukunganbidang Kesehatan, bantuan sosial dan upaya pemulihan ekonomi dari dampak *pandemic* COVID-19. Meskipun demikian, sebagai jajaran Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung tetap mengupayakan optimalisasi capaian target kinerja sebagaimana tertuang dalam Renstra Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2023-2026.

Tujuan penyusunan laporan ini adalah untuk memberikan gambaran tingkat pencapaian instansi yang mengindikasikan tingkat keberhasilan dan kegagalan pencapaian sasaran strategis berdasarkan indikator-indikator yang ditetapkan. Diharapkan penyajian LKjIP ini dapat menjadi bahan evaluasi untuk perbaikan kinerja agar lebih berorientasi pada hasil, relevan, efektif, efisien dan berkelanjutan di masa mendatang.

Pangkalpinang, Januari 2024

Plt. Kepala Dinas  
Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah



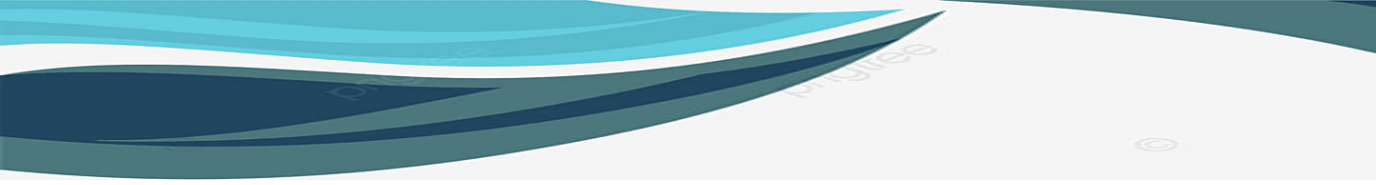
RIZA ARYANI, S. Sos., M. Si  
NIP. 19750130 200212 2 006

## Ikhtisar Eksekutif

Capaian kinerja Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2023 dalam mewujudkan sasaran strategis dapat digambarkan sebagai berikut:

1. Capaian sasaran strategis 1. Meningkatnya Pertumbuhan Koperasi; (target indikator tercapai)
  - Diukur dengan indikator sebagai berikut :
    - a. Persentase pertumbuhan koperasi, Formulasi Perhitungan :
$$\frac{(\text{Jumlah Koperasi Tahun 2023} - \text{Jumlah koperasi Tahun 2022}) \times 100\%}{\text{Jumlah koperasi Tahun 2022}}$$
    - b. Meningkatnya Pertumbuhan UKM, Formulasi Perhitungan :
$$\frac{(\text{Jumlah Usaha Kecil Tahun 2023} - \text{Jumlah Usaha Kecil Tahun 2022}) \times 100\%}{\text{Jumlah Usaha Kecil Tahun 2022}}$$
  - Capaian indikator (a.) dimaksud didukung oleh kinerja sebanyak 4 (empat) Program, yakni Program Program Pelayanan Izin Usaha Simpan Pinjam, Program Pengawasan dan Pemeriksaan Koperasi, Program Penilaian Kesehatan KSP/USP Koperasi, Program Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi.
  - Capaian indikator (b.) dimaksud didukung oleh kinerja sebanyak 2 (dua) Program, yakni Program Pemberdayaan UMKM, Program Pengembangan UMKM
  - Target capaian indikator sasaran (a) tahun 2023 sebesar 17,65%; sampai dengan bulan Desember 2023 terealisasi 17,65%. Prosentase realisasi terhadap target (capaian dibagi target dikalikan 100%) mencapai 100%.

- Dibandingkan dengan capaian target tahun 2022 sebesar 17,24% terjadi peningkatan sebesar 102,38%.
  - Target capaian indikator sasaran (b) tahun 2023 sebesar 0,53%; sampai dengan bulan Desember 2023 terealisasi 3,57%. Dengan demikian capaian ini telah melampaui target, Prosentase realisasi terhadap target (capaian dibagi target dikalikan 100%) mencapai 100%.
  - Dibandingkan dengan capaian target tahun 2022 sebesar 10,61%, capaian tahun 2023 relatif rendah hal ini terjadi karena adanya perubahan kebijakan Pemerintah Pusat terkait kriteria usaha, mikro, kecil, menengah dan besar melalui peraturan pemerintah Nomor 7 Tahun 2021 tentang Kemudahan, Pelindungan, dan Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah menggantikan peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2013 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 Tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah.
2. Capaian sasaran strategis 2. Meningkatnya Kualitas SDM KUKM untuk indikator yang target kinerjanya tidak tercapai
- Diukur dengan indikator sebagai berikut :
    - a. Persentase SDM KUKM yang terlatih, Formulasi perhitungan :
 
$$\frac{\text{Jumlah SDM KUKM yang bersertifikat}}{\text{Jumlah SDM KUKM seluruhnya}} \times 100\%$$
  - Capaian indikator dimaksud didukung oleh kinerja Program Pendidikan dan Latihan Perkoperasian
  - Target capaian indikator sasaran tahun 2023 sebesar 0,304%; sampai dengan akhir Bulan Desember 2023 terealisasi 0,314%. Dengan demikian capaian ini tidak sesuai dengan target. Prosentase realisasi terhadap target (capaian dibagi target dikalikan 100%) mencapai 103,29%.
  - Tidak tercapainya target ini dikarenakan kurangnya antusias pengurus



Koperasi dan Pelaku UKM untuk mengikuti pelatihan yang mengakibatkan turun dan rendahnya peserta pelatihan dari pelaku koperasi dan UKM.

Terhadap capaian kinerja sebagaimana tersebut di atas terdapat beberapa tantangan yang perlu menjadi perhatian bagi Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung ke depan, sebagai berikut:

1. Rendahnya daya saing SDM koperasi dan pelaku UKM
2. Masih rendahnya akses permodalan dan finansial pada pelaku UKM dan Koperasi
3. Kurangnya Inovasi teknologi terkait pengembangan produk UKM
4. Kurangnya Akses promosi dan pemasaran terhadap terhadap produk UKM
5. Masih rendahnya standarisasi produk dan perijinan para pelaku UKM dan Koperasi

Hasil evaluasi yang disampaikan dalam Laporan Kinerja Instansi Pemerintah ini penting dipergunakan sebagai pijakan bagi Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dalam perbaikan kinerja di tahun yang akan datang.

# Daftar Isi

KATA PENGANTAR.....	2
IKHTISAR EKSEKUTIF.....	3
DAFTAR ISI.....	5
DAFTAR TABEL .....	6
DAFTAR GAMBAR.....	7
BAB I    PENDAHULUAN .....	8
1.1 Cascading Kinerja sebagai Dasar Pembentukan Organisasi Perangkat Daerah .....	8
1.2 Mandat Kinerja, Peta Proses Bisnis dan Struktur .....	9
1.3 Tugas, Fungsi dan Peta Jabatan.....	11
1.4 Isu-isu Strategis .....	12
1.5 Dukungan SDM, Sarana-Prasarana dan Anggaran.....	12
1.6 Tindak Lanjut atas Laporan Hasil Evaluasi SAKIP 2021 .....	15
BAB II   PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA.....	16
2.1 Tujuan, Sasaran dan Indikator Kinerja OPD .....	16
2.2 Strategi dan Arah Kebijakan .....	17
2.3 Struktur Program dan kegiatan 2022 .....	17
2.4 Perjanjian Kinerja Tahun 2022 .....	19
2.5 Instrumen Pendukung Capaian Kinerja .....	19
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA.....	21
3.1. Capaian Kinerja Tahun 2022.....	21
3.2. Analisis Ketercapaian Kinerja Tahun 2022.....	26
3.3. Realisasi Anggaran .....	30
BAB IV PENUTUP .....	32
LAMPIRAN-LAMPIRAN.....	33

# Daftar Tabel

Tabel I.1 Jumlah Pegawai Menurut Kualifikasi Jabatan, Jenis Kelamin dan Kompetensi .....	13
Tabel I.2 Sarana-Prasarana .....	14
Tabel I.3 Perbandingan Anggaran Tahun 2021 dan 2022 .....	15
Tabel II.1 Sasaran Strategis Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung .....	17
Tabel II.2 Strategi dan Arah Kebijakan .....	17
Tabel II.3.1 Struktur Program dan Kegiatan terkait Langsung Pencapaian Sasaran Tahun 2022 .....	18
Tabel II.3.2 Struktur Program dan Kegiatan Pendukung Pencapaian Sasaran Tahun 2022 .....	18
Tabel II.4 Perjanjian Kinerja Kepala Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Tahun 2022 .....	19
Tabel III.1 Skala Nilai Peringkat Kinerja .....	21
Tabel III.2 Capaian Kinerja Tahun 2022 .....	22
Tabel III.3 Pengukuran Capaian Sasaran 1 .....	24
Tabel III.4 Target dan Realisasi Kinerja .....	25
Tabel III.5 Anggaran dan Realisasi Belanja Langsung per Sasaran Tahun 2022 .....	27

## Daftar Gambar

Gambar I.1. Cascading Kinerja .....	9
Gambar I.2. Mandat Kinerja Peta Proses Bisnis dan Struktur Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung .....	10
Gambar I.3. Tugas, Fungsi dan Peta Jabatan pada Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung .....	10
Gambar II.1. Website Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung .....	10
Gambar II.2. Layanan Pengaduan Melalui Website Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung .....	10

# BAB I

## Pendahuluan

1.

Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) merupakan bentuk pertanggungjawaban setiap instansi Pemerintah/Pemerintah Daerah yang menyusun Perjanjian Kinerja, atas penggunaan anggaran yang bersumber dari APBD dan/atau APBN. Dasar hukum penyusunan meliputi:

1. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
2. Peraturan Menteri PAN dan RB RI Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
3. Peraturan Gubernur 54 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyelenggaraan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.

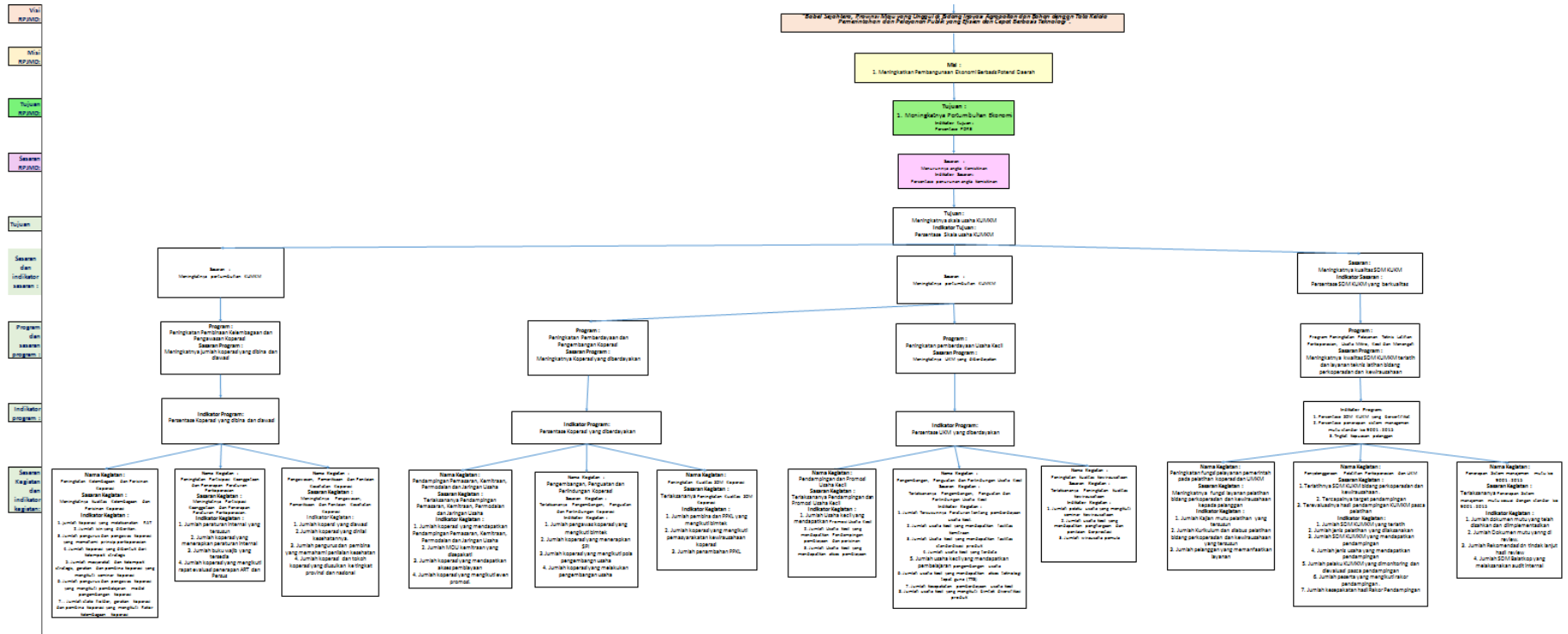
Adapun tujuan penyusunan LKjIP sebagai berikut:

1. Memberikan informasi kinerja yang terukur kepada pemberi mandat ataskinerja yang telah dan seharusnya dicapai;
2. Sebagai upaya perbaikan berkesinambungan untuk meningkatkan kinerja instansi.

## **1.1 *Cascading Kinerja, Peta Proses Bisnis dan Struktur Organisasi***

Setiap Perangkat Daerah (PD) dibentuk untuk memberikan kontribusi pada pencapaian visi, misi, tujuan dan sasaran pembangunan sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Gubernur Kepulauan Bangka Belitung Nomor 14 Tahun 2022 tentang Rencana Pembangunan Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2023-2026. Hubungan antara cascading kinerja, peta proses bisnis dan desain struktur organisasi Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung sebagaimana tersaji dalam gambar berikut:

## CASCADING KINERJA DINAS KOPERASI DAN UKM



Ket : Cascading lengkap dapat dilihat melalui link :

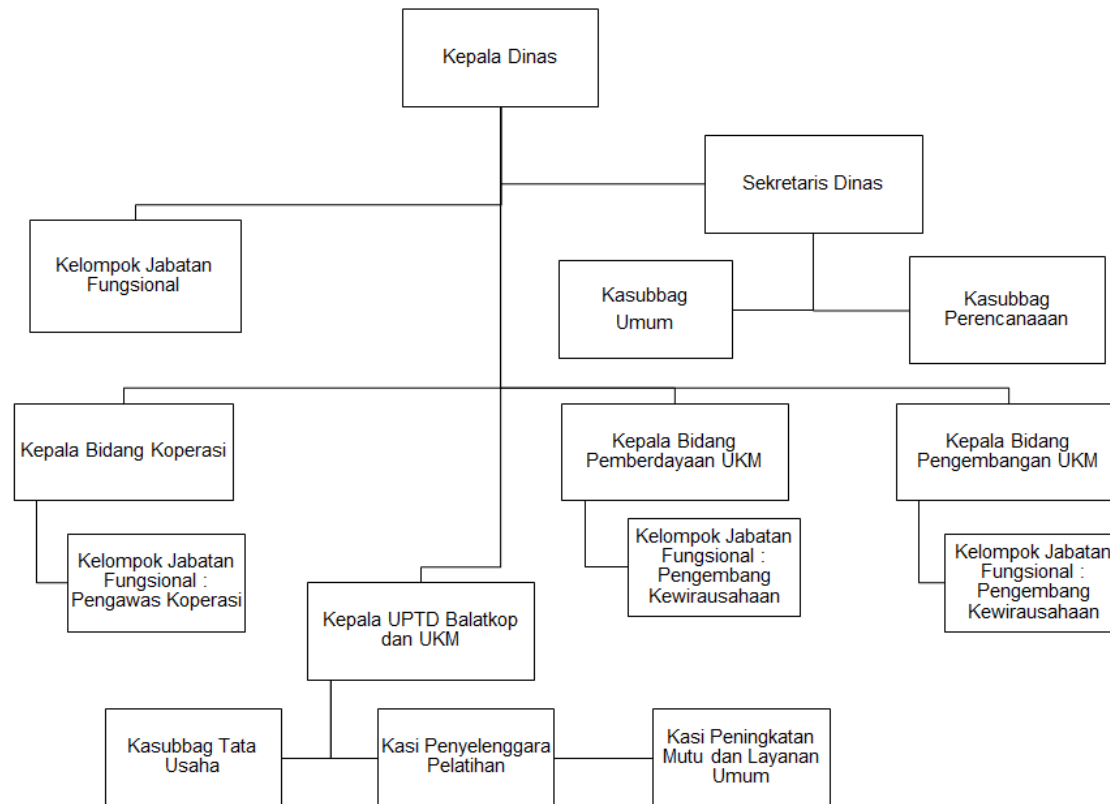
## PETA PROSES BISNIS DINAS KOPERASI DAN UKM

### IDENTIFIKASI PETA PROSES

PETA PROSES (KODE)	SUB PETA PROSES		STRATEGI PROGRAM		PETA LINTAS FUNGSI	
	KODE	SUB PETA PROSES	PROGRAM	KODE	CFM	BIDANG
<b>Meningkatnya pertumbuhan Volume Usaha KUKM (DKUKM01)</b>	<b>DKUKM.02.01</b>	Meningkatnya Pertumbuhan Koperasi	Pengawasan dan Pemeriksaan Koperasi	<b>DKUKM.02.01.CFM.04</b>	Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi	<b>BIDANG KOPERASI</b>
			Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi	<b>DKUKM.02.01.CFM.05</b>	Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi yang Keanggotaannya Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi	<b>BIDANG KOPERASI</b>
			Penilaian Kesehatan KSP/USP Koperasi	<b>DKUKM.02.01.CFM.06</b>	Penilaian Kesehatan Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi	<b>BIDANG KOPERASI</b>
	<b>DKUKM.02.02</b>	Meningkatnya Pertumbuhan Usaha Kecil	Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha kecil dan Usaha Mikro (UMKM)	<b>DKUKM.02.02.CFM.07</b>	Pemberdayaan Usaha Kecil yang dilakukan Melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perijinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi Dengan Para Pemangku Kepentingan	<b>BIDANG PEMBERDAYAAN USAHA KECIL</b>
			Peningkatan Pengembangan Usaha Menengah, Usaha Kecil dan Usaha Mikro (UMKM)	<b>DKUKM.02.02.CFM.08</b>	Pengembangan Usaha Kecil Dengan Orientasi Peningkatan Skala Usaha Menjadi Usaha Menengah	<b>BIDANG PENGEMBANGAN USAHA KECIL</b>
	<b>DKUKM.02.03</b>	Meningkatnya Kualitas SDM KUKM	Pendidikan dan Pelatihan Perkoperasian	<b>DKUKM.02.03.CFM.09</b>	Pendidikan dan Latihan Perkoperasian Bagi Koperasi yang Wilayah Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi	<b>BALAI LATIHAN KOPERASI</b>

Ket : Peta Proses Bisnis lengkap dapat dilihat melalui link :

### STRUKTUR ORGANISASI DINAS KOPERASI DAN UKM



Berdasarkan Keputusan Gubernur Kepulauan Bangka Belitung Nomor 188.44/2222/VI/2023

Tentang Peta Jabatan pada Perangkat Daerah  
di Lingkungan Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung

## 1.2 Tugas, Fungsi dan Peta Jabatan

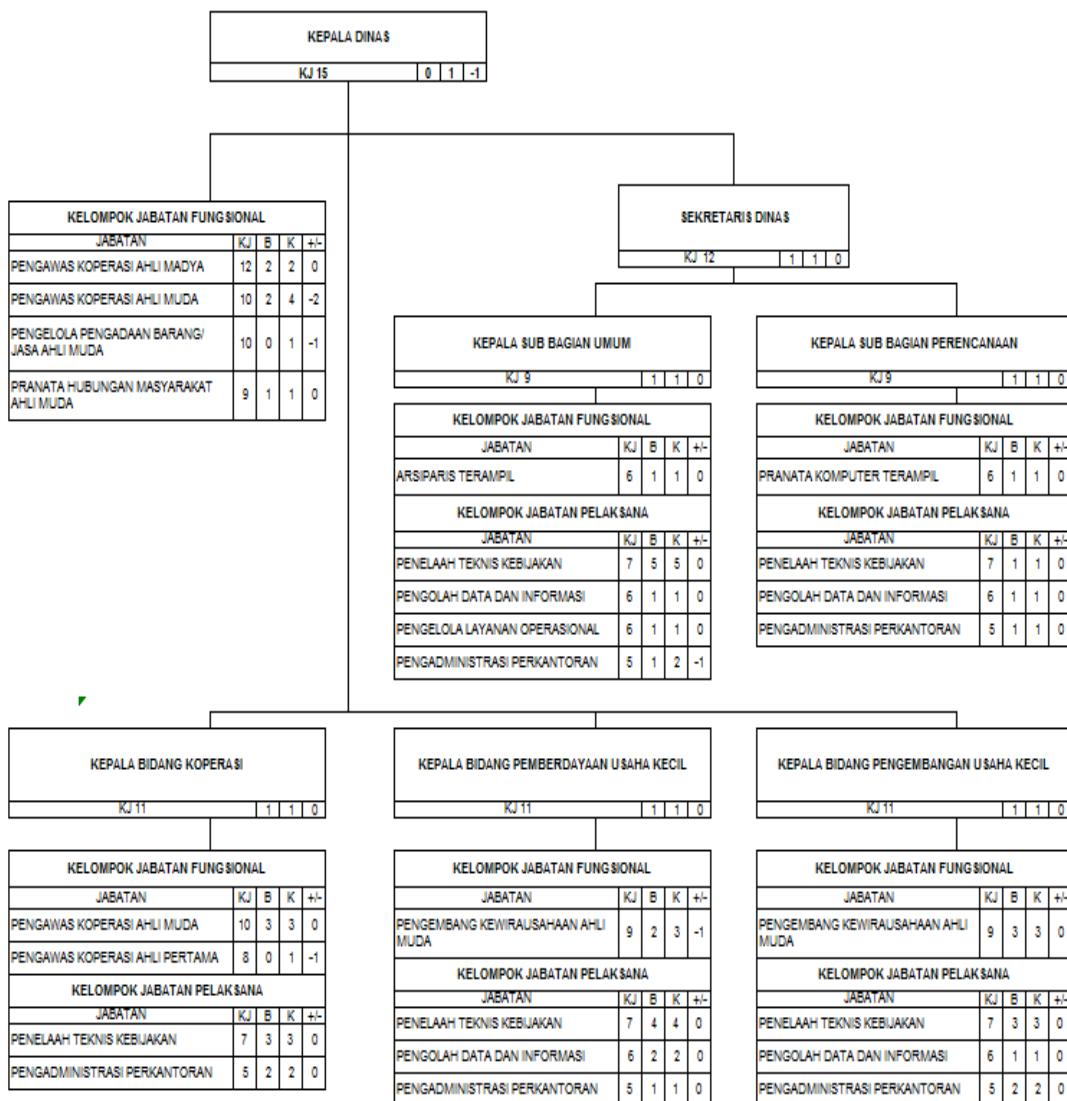
Dalam upaya mewujudkan kinerja sebagaimana telah dimandatkan dalam RPJMD, Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung memiliki tugas dan fungsi yang kemudian menjadi dasar penempatan personil dalam jabatan sebagaimana gambar berikut:

**Gambar I.2.**  
**Tugas, Fungsi dan Peta Jabatan pada Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung**

Berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Nomor 9 Tahun 2020 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung mempunyai tugas membantu Gubernur melaksanakan urusan pemerintahan bidang koperasi, usaha kecil dan menengah. Adapun Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung fungsi sebagai berikut :

1. Penyelenggaraan perumusan kebijakan teknis di bidang koperasi, usaha kecil dan menengah yang menjadi kewenangan Provinsi;
2. Penyelenggaraan kebijakan teknis di bidang koperasi, usaha kecil dan menengah yang menjadi kewenangan Provinsi;
3. Penyelenggaraan administrasi Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah;
4. Penyelenggaraan pemantauan, evaluasi dan pelaporan Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah; dan
5. Penyelenggaraan fungsi lain sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Gambar 1.4 Peta Jabatan Dinas Koperasi dan UKM



### 1.3 Isu-Isu Strategis

Eksistensi sebuah institusi bergantung sejauh mana institusi tersebut mampu menangkap dan merespon isu strategis dengan berbagai kebijakan dan tindakan yang tepat. Secara umum isu strategis dapat bersumber dari lingkungan eksternal maupun lingkungan internal. Isu-isu strategis yang melingkupi Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung adalah “Masih belum optimalnya kontribusi Sektor koperasi dan UKM dalam perluasan kesempatan kerja di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung”.

Adapun permasalahan yang dihadapi antara lain :

1. Belum optimalnya upaya pengembangan volume usaha baik koperasi maupun UKM;
2. Masih rendahnya kemampuan SDM Koperasi dan UKM;
3. Minimnya jaringan usaha baik UKM maupun koperasi;
4. Belum optimalnya fasilitasi akses sumber permodalan bagi Koperasi dan UKM;
5. Belum standarnya desain *packaging* produk KUKM;
6. Masih terbatasnya fasilitasi pemasaran produk KUKM;
7. Belum terjalin sinergitas pembinaan dan pengembangan KUKM dengan OPD pada kabupaten/kota;
8. Masih kurangnya pembinaan terhadap calon eksportir dan pelaku promosi/misi dagang ke luar negeri mengenai produk unggulan daerah;
9. Masih rendahnya akses pelaku koperasi dan UKM pada perbankan;
10. Belum adanya gedung pemasaran produk Koperasi dan UMKM yang representatif;
11. Lemahnya pengawasan terhadap koperasi yang ada, sehingga jumlah koperasi yang tidak aktif relatif banyak;
12. Belum optimalnya tata kelola koperasi dan UKM yang bergerak pada usaha-usaha untuk menopang sektor pariwisata dan pengolahan hasil perikanan dan pertanian.

### 1.4 Dukungan SDM, Sarana-Prasarana dan Anggaran

Dukungan sumber daya manusia, sarana-prasarana dan anggaran pada tahun 2023 sebagaimana tabel berikut:

**Tabel I.1 Jumlah Pegawai Menurut Kualifikasi Jabatan, Jenis Kelamin dan Kompetensi**

NO	JABATAN	FORMASI/PETA JABATAN						PEGAWAI YANG ADA						JENIS KELAMIN	
		JUMLAH	KUALIFIKASI					JUMLAH	KUALIFIKASI					LAKI-LAKI	PEREMPUAN
			S3	S2	S1	D3	SMA/SMP		S3	S2	S1	D3	SMA/SMP		
<b>A</b>	<b>JABATAN STRUKUTRAL</b>	<b>11</b>	<b>1</b>	<b>5</b>	<b>5</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>10</b>	<b>1</b>	<b>5</b>	<b>4</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>6</b>	<b>4</b>
1	Eselon II	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	Eselon III	5	1	3	1	0	0	5	1	3	1	0	0	2	3
3	Eselon IV	5	0	2	3	0	0	5	0	2	3	0	0	4	1
<b>B</b>	<b>JABATAN FUNGSIONAL</b>	<b>19</b>	<b>0</b>	<b>4</b>	<b>13</b>	<b>0</b>	<b>2</b>	<b>15</b>	<b>0</b>	<b>4</b>	<b>9</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>10</b>	<b>5</b>
1	Ahli Madya	3	0	1	2	0	0	2	0	1	2	0	0	3	0
2	Ahli Muda	13	0	3	10	0	0	11	0	3	8	1	0	7	4
3	Ahli Pertama	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	Terampil	2	0	0	0	0	2	1	0	0	0	0	1	0	1
<b>C</b>	<b>JABATAN PELAKSANA</b>	<b>27</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>15</b>	<b>6</b>	<b>9</b>	<b>27</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>15</b>	<b>5</b>	<b>7</b>	<b>15</b>	<b>12</b>
<b>D</b>	<b>PHL</b>	<b>39</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>13</b>	<b>3</b>	<b>23</b>	<b>36</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>12</b>	<b>2</b>	<b>22</b>	<b>25</b>	<b>11</b>

Sumber : Data Kepegawaian Dinas KUKM Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2023

Berdasarkan data pada tabel I.1, tingkat pendidikan SDM Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung relatif tinggi dan merata antara laki-laki dan perempuan, didominasi oleh jenjang pendidikan S1 sebanyak 40 orang (45,45%), disusul oleh jenjang pendidikan SLTA sebanyak 30 orang (34,09%), S2 sebanyak 9 orang (10,23%), D3 sebanyak 8 orang (9,09%), S3 sebanyak 1 orang (1,14%), SLTP sebanyak 0 orang (0%), dan SD sebanyak 0 orang (0%). Komposisi pegawai laki-laki lebih banyak dibanding pegawai perempuan; akan tetapi untuk jabatan struktural lebih banyak dijabat oleh perempuan. Hal ini menunjukkan adanya sistem merit dan kesetaraan gender dalam manajemen SDM aparatur.

**Tabel I.2 Sarana-Prasarana**

No.	Klasifikasi	Jumlah Barang	Nilai Aset*
<b>1</b>	<b>TANAH</b>		<b>304.380.541</b>
	TANAH	1	304.380.541
<b>2</b>	<b>PERALATAN DAN MESIN</b>		<b>4.448.993.568</b>
	ALAT BESAR	-	0
	ALAT ANGKUTAN	12	738.112.500
	ALAT BENGKEL DAN ALAT UKUR	-	0
	ALAT PERTANIAN	-	5.267.457,50
	ALAT KANTOR DAN RUMAH TANGGA	75	2.746.693.982,50
	ALAT STUDIO, KOMUNIKASI DAN PEMANCAR	-	185.210.218
	ALAT KEDOKTERAN DAN KESEHATAN	-	0
	ALAT LABORATORIUM	-	0
	ALAT PERSENJATAAN	-	0
	KOMPUTER	35	731.203.400
	ALAT EKSPLORASI	-	0
	ALAT PENGEBORAN	-	0
	ALAT PRODUKSI, PENGOLAHAN DAN PEMURNIAN	-	0
	ALAT BANTU EKSPLORASI	-	0
	ALAT KESELAMATAN KERJA	-	42.469.000
	ALAT PERAGA	-	0
	PERALATAN PROSES/PRODUKSI	-	0
	RAMBU – RAMBU	-	0
	PERALATAN OLAH RAGA	3	0
<b>3</b>	<b>GEDUNG DAN BANGUNAN</b>		<b>15.100.223.500</b>
	BANGUNAN GEDUNG	3	14.705.523.500

No.	Klasifikasi	Jumlah Barang	Nilai Aset*
	MONUMEN	-	0
	BANGUNAN MENARA	-	0
	TUGU TITIK KONTROL/PASTI	-	394.700.000
<b>4</b>	<b>JALAN, IRIGASI DAN JARINGAN</b>		<b>805.105.000</b>
	JALAN DAN JEMBATAN	-	198.500.000
	BANGUNAN AIR	-	406.900.000
	INSTALASI	-	172.286.000
	JARINGAN	-	27.419.000
<b>5</b>	<b>ASET TETAP LAINNYA</b>		<b>9.997.500</b>
	BAHAN PERPUSTAKAAN	-	9.997.500
	BARANG BERCORAK KESENIAN/KEBUDAYAAN/OLAH RAGA	-	0
	HEWAN	-	0
	BIOTA PERAIRAN	-	0
	TANAMAN	-	0
	BARANG KOLEKSI NON BUDAYA	-	0
	ASET TETAP DALAM RENOVASI	-	0
<b>6</b>	<b>KOSTRUKSI DALAM Pengerjaan</b>		<b>699.154.500</b>
	KONSTRUKSI DALAM Pengerjaan	1	699.154.500
<b>7</b>	<b>ASET LAINNYA</b>		<b>199.044.000</b>
	ASET TAK BERWUJUD	-	0
	ASET LAIN-LAIN	-	199.044.000

Sumber : Buku Inventaris Dinas KUKM Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2022

Kendaraan operasional Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung terdiri dari yakni 1 unit kendaraan dinas jabatan, 3 unit kendaraan operasional, 8 unit kendaraan roda dua. Kebutuhan ruangan kantor umum relatif sudah tersedia meliputi ruang rapat, ruang pengelola keuangan, ruang arsip, ruang mushola, ruang baca, ruang gudang, ruang tunggu, ruang laktasi, dan toilet. Adapun perlengkapan kantor berupa meja, kursi, lemari, filling cabinet, pendingin ruangan, alat pemadam kebakaran dan lain-lain sudah tersedia dalam kondisi baik. Rasio personal komputer/laptop dibanding jumlah pegawai mendekati 1:1. Dengan demikian ketersediaan sarana dan prasarana sudah memadai namun perlu perbaikan dan perawatan yang intensif. Hanya saja sebanyak 30 % dari komputer/laptop yang ada diproduksi Tahun 2000-an awal yang spesifikasinya sudah jauh

tertinggal dengan kondisi saat ini sehingga kurang mendukung untuk tuntutan pekerjaan yang 90% berbasis IT.

**Tabel I.3 Perbandingan Anggaran Tahun 2022 dan 2023**

Tahun	Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tak Terduga	Belanja Transfer	Jumlah
2022	22.243.963.903,-	68.441.757,-	0,-	0,-	22.312.405.660,-
2023	23.142.191.530,-	1.165.921.800,-	0,-	0,-	24.308.113.330,-

Sumber : Laporan Realisasi Anggaran Dinas KUKM Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2023

Dukungan anggaran untuk melaksanakan tugas dan fungsi Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Terlihat pada tabel I.3, untuk tahun 2023 dibanding tahun 2022 terdapat kenaikan Total anggaran belanja sebesar Rp 1.995.707.670. Hal ini menunjukkan meningkatnya anggaran dalam memfasilitasi dan mendukung program-program Dinas Koperasi dan UKM Tahun 2023.

**Tabel 1.4 Tindak Lanjut atas Laporan Hasil Evaluasi SAKIP Tahun 2022**

No	Saran/Rekomendasi	Tindak lanjut
1.	<p>Surat Inspektur Provinsi Kepulauan Bangka Belitung            Nomor : 700/158/LHE/ITDA/2023 tanggal 27 Juni 2023 perihal Laporan Hasil Evaluasi atas Implementasi SAKIP Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung TA. 2022 :</p> <p>Rekomendasi:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Perlu adanya perhatian sepenuhnya dari pimpinan OPD dan seluruh pegawai dalam rangka meningkatkan kinerja pemerintah pada Dinas KUKM Provinsi Kepulauan Bangka Belitung atas penyajian informasi dalam laporan SAKIP OPD</li> <li>2. Perlu adanya peningkatan pedoman teknis Evaluasi akuntabilitas kinerja internal antara lain membuat pedoman evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal sesuai standar</li> </ol>	<p>Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung melakukan berbagai upaya untuk meningkatkan pencapaian target kinerja (output dan outcome) Tahun 2022 dengan langkah-langkah:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Meningkatkan keikutsertaan Pegawai dalam penguatan kapasitas baik yang secara luring maupun daring dan baik dari pemerintah daerah maupun dari luar (swasta).</li> <li>2. Sudah menyiapkan pedoman evaluasi akuntabilitas, dan sudah disampaikan ke Inspektorat Provinsi.</li> </ol>

	3. Pelaksanaan Evaluasi Akuntabilitas Kinerja internal yang dilaksanakan menggunakan teknologi informasi (aplikasi) perlu ditingkatkan	3. Memaksimalkan penggunaan aplikasi e-sakip Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.
--	--	---

*Sumber : Laporan Hasil Evaluasi Inspektorat Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2023*

## BAB 2

# Perencanaan dan Perjanjian Kinerja

*Bab 2 Berisi :*

1. *Tujuan, Sasaran dan Indikator Kinerja OPD*
2. *Strategi dan Arah Kebijakan*
3. *Struktur Program dan Kegiatan Tahun 2022*
4. *Perjanjian Kinerja Tahun 2022*
5. *Instrumen Pendukung Capaian Kinerja PD*

Renstra Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2023-2026 yang merupakan penjabaran operasional RPD Tahun 2023-2026 telah mengakomodasi dinamika program/kegiatan selama kurun waktu 2023 – 2026. Renstra ditetapkan dengan Peraturan Gubernur Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Nomor 19 Tahun 2022 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2023-2026.

### 2.1. Tujuan, Sasaran dan Indikator Kinerja OPD

Sesuai *cascade* kinerja, Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung mendukung pencapaian sasaran Pemerintah Daerah meningkatnya skala usaha KUKM (Sasaran RPD yang diampu Perangkat Daerah) Terkait hal tersebut tujuan jangka menengah Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung selama empat tahun adalah “Meningkatnya kesempatan kerja”.

Adapun sasaran Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dalam waktu empat tahun sebagai berikut:

**Tabel II.1 Sasaran Strategis Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, 2023-2026**

NO.	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	SAT	Baseli ne 2022	TARGET TAHUNAN				Target akhir Renstra	Ket
					2023	2024	2025	2026		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	11	12
1.	Meningkatnya pertumbuhan Koperasi	Persentase pertumbuhan koperasi	%	10,61 %	17.65 %	16.67 %	16.9 5%	17.25 %	17.25%	
2.	Meningkatnya pertumbuhan UKM	Persentase pertumbuhan UKM	%	17,24 %	0.53 %	0.56 %	0.59 %	0.61 %	0.61%	
3.	Meningkatnya kualitas SDM KUKM	Persentase SDM KUKM yang berkualitas	%	21,69 %	0.304 %	0.32 5%	0.34 7%	0.369 %	0.369%	
4.	Meningkatkan tata kelola Pemerintahan	Nilai Reformasi Birokrasi (RB) Perangkat Daerah	%	80,00 %	80,50 %					
		Nilai Capaian Kinerja Perangkat Daerah		81.06	78.00	78.05	78.45	78.85	78.85	

Sumber : Renstra Perubahan Dinas KUKM Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2023-2026

## 2.2. Strategi dan Arah Kebijakan

Strategi dan kebijakan untuk mencapai tujuan dan sasaran jangka menengah, diuraikan dalam tabel sebagai berikut:

**Tabel II.2 Strategi dan Arah Kebijakan**

SASARAN	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN
1. Meningkatkan pertumbuhan Koperasi	1.1. Meningkatkan kualitas Kelembagaan dan Perizinan Koperasi. 1.2. Meningkatkan Partisipasi Keanggotaan dan Penerapan Peraturan Perkoperasian. 1.3. Meningkatkan Pengawasan, Pemeriksaan dan Penilaian Kesehatan Koperasi	1.1.1. Meningkatkan kualitas Kelembagaan dan Perizinan Koperasi. 1.1.2. Meningkatkan Partisipasi Keanggotaan dan Penerapan Peraturan Perkoperasian. 1.1.3. Meningkatkan Pengawasan, Pemeriksaan dan Penilaian Kesehatan Koperasi
2. Meningkatkan pertumbuhan KUMKM	2.1. Terlaksananya Pendampingan Pemasaran, Kemitraan, Permodalan dan Jaringan Usaha 2.2. Terlaksananya Pengembangan, Penguatan dan Perlindungan Koperasi. 2.3. Terlaksananya Peningkatan Kualitas SDM Koperasi 2.4. Terlaksananya Pendampingan dan Promosi Usaha Kecil. 2.5. Terlaksananya Pengembangan, Penguatan dan Perlindungan Usaha Kecil. 2.6. Terlaksananya Peningkatan kualitas kewirausahaan	2.1.1. Terlaksananya Pendampingan Pemasaran, Kemitraan, Permodalan dan Jaringan Usaha 2.2.1. Terlaksananya Pengembangan, Penguatan dan Perlindungan Koperasi. 2.3.1. Terlaksananya Peningkatan Kualitas SDM Koperasi 2.4.1. Terlaksananya Pendampingan dan Promosi Usaha Kecil. 2.5.1. Terlaksananya Pengembangan, Penguatan dan Perlindungan Usaha Kecil. 2.6.1. Terlaksananya Peningkatan kualitas kewirausahaan
3. Meningkatkan kualitas SDM KUMKM	3.1. Terlatihnya SDM KUMKM bidang perkoperasian dan kewirausahaan. 3.2. Tercapainya target pendampingan 3.3. Terevaluasinya hasil pendampingan KUMKM pasca pelatihan	3.1.1. Terlatihnya SDM KUMKM bidang perkoperasian dan kewirausahaan. 3.1.2. Tercapainya target pendampingan 3.1.3. Terevaluasinya hasil pendampingan KUMKM pasca pelatihan

SASARAN	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN
	3.4. Meningkatnya Penerapan Mutu pelatihan KUMKM 3.5. Terlaksananya Penerapan Sistem manajemen mutu sesuai dengan standar ISO 9001 : 2015	3.1.4. Meningkatnya Penerapan Mutu pelatihan KUMKM 3.1.5. Terlaksananya Penerapan Sistem manajemen mutu sesuai dengan standar ISO 9001 : 2015

Sumber : Renstra Perubahan Dinas KUKM Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2017-2022

### 2.3. Struktur Program dan Kegiatan Tahun 2023

Struktur program dan kegiatan yang berkaitan langsung dengan tercapainya sasaran Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung tahun 2023 maupun program dan kegiatan sebagaimana tabel berikut:

**Tabel II.3 Struktur Program dan Kegiatan terkait Langsung Pencapaian Sasaran Tahun 2023**

Sasaran	Program/Kegiatan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Bertambah /Berkurang
1. Meningkatnya pertumbuhan Koperasi	<b>1.1. Program Pelayanan Izin Usaha Simpan Pinjam</b>	<b>39.999.800</b>	<b>33.999.800</b>	<b>6.000.000</b>
	1.1.1. Penerbitan Izin Usaha Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	39.999.800	33.999.800	6.000.000
	<b>1.2. Program Pengawasan Dan Pemeriksaan Koperasi</b>	<b>99.746.000</b>	<b>99.746.000</b>	<b>0</b>
	1.2.1. Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya Lintas Daerah Kabupaten/ Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	90.746.000	90.746.000	0
	1.2.2. Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya	9.000.000	9.000.000	0

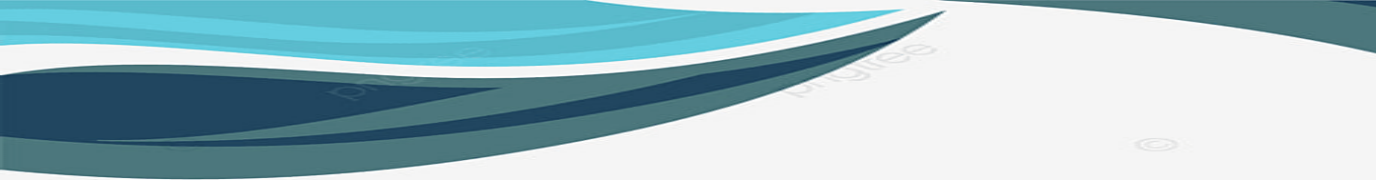
Sasaran	Program/Kegiatan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Bertambah /Berkurang
	Lintas Daerah Kabupaten/ Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi			
	<b>1.3. Program Penilaian Kesehatan KSP/USP Koperasi</b>	<b>73.999.500</b>	<b>73.999.500</b>	<b>0</b>
	1.3.1. Kegiatan Penilaian Kesehatan Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	<b>73.999.500</b>	<b>73.999.500</b>	<b>0</b>
	<b>1.4. Program Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi</b>	<b>390.761.800</b>	<b>346.761.500</b>	<b>44.000.300</b>
	1.4.1. Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi yang Keanggotaannya Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	<b>390.761.800</b>	<b>346.761.500</b>	<b>44.000.300</b>
2. Meningkatkan pertumbuhan UKM	<b>2.1. Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil, Dan Usaha Mikro (UMKM)</b>	<b>1.379.622.100</b>	<b>2.781.997.092</b>	<b>(1.402.374.992)</b>
	2.1.1. Pemberdayaan Usaha Kecil yang dilakukan Melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perijinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi Dengan Para Pemangku Kepentingan	<b>1.379.622.100</b>	<b>2.781.997.092</b>	<b>(1.402.374.992)</b>
	<b>2.2. Program Pengembangan UMKM</b>	<b>1.223.727.100</b>	<b>5.278.595.760</b>	<b>(4.054.868.660)</b>
	2.2.1. Pengembangan Usaha Kecil dengan Orientasi Peningkatan Skala Usaha Menjadi Usaha Menengah	<b>1.223.727.100</b>	<b>5.278.595.760</b>	<b>(4.054.868.660)</b>
3. Meningkatkan Kualitas SDM	<b>3.1. Program Pendidikan dan Latihan Perkoperasian</b>	<b>2.919.212.800</b>	<b>2.981.212.800</b>	<b>(62.000.000)</b>

Sasaran	Program/Kegiatan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Bertambah /Berkurang
KUKM	3.1.1. Pendidikan dan Latihan Perkoperasian bagi Koperasi yang Wilayah Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	2.919.212.800	2.981.212.800	(62.000.000)
4. Meningkatkan tata kelola Pemerintahan	<b>4.1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi</b>	<b>13.537.326.634</b>	<b>12.711.800.878</b>	<b>825.525.756</b>
	4.1.1. Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	43.999.800	65.971.200	(21.971.400)
	4.1.2. Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	8.965.839.409	7.954.340.508	1.011.498.901
	4.1.3. Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	130.750.000	110.750.000	20.000.000
	4.1.4. Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	860.483.600	1.054.583.600	(194.100.000)
	4.1.5. Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	1.048.334.100	1.172.521.800	(124.187.700)
	4.1.6. Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1.830.016.125	1.728.875.570	101.140.555
	4.1.7. Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	657.903.600	624.758.200	33.145.400
	<b>Total Anggaran yang Berkaitan Langsung dengan Pencapaian Sasaran</b>	<b>19.664.395.734</b>	<b>24.308.113.330</b>	<b>(4.643.717.596)</b>

Sumber : DPPA Dinas KUKM Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2023

#### 2.4. Perjanjian Kinerja Tahun 2023

Dokumen Perjanjian Kinerja (PK) merupakan dokumen yang berisikan penugasan dari pimpinan instansi yang lebih tinggi kepada pimpinan instansi yang lebih rendah untuk melaksanakan program/kegiatan yang disertai dengan indikator kerjanya. Adapun



Perjanjian Kinerja Kepala Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2023 yang merepresentasikan kinerja instansi dengan Bapak Gubernur Kepulauan Bangka Belitung sebagai berikut :

**Tabel II.4 Perjanjian Kinerja Kepala Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2023**

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Target Kinerja	Triwulan	Target
(1)	(2)	(3)		(4)		
1.	Meningkatnya Pertumbuhan Koperasi	Persentase pertumbuhan koperasi	%	17,65%	Triwulan I	4,25 %
					Triwulan II	4,25 %
					Triwulan III	4,50 %
					Triwulan IV	4,65 %
2.	Meningkatnya Pertumbuhan UKM	Persentase pertumbuhan UKM	%	0,53%	Triwulan I	0,13%
					Triwulan II	0,13%
					Triwulan III	0,13%
					Triwulan IV	0,14%
3.	Meningkatnya Kualitas SDM KUKM	Persentase SDM KUKM yang terlatih	%	0,304%	Triwulan I	0,46%
					Triwulan II	0,86 %
					Triwulan III	0,86 %
					Triwulan IV	0,86 %
4.	Meningkatkan tata kelola Pemerintahan	Nilai Capaian Kinerja Perangkat Daerah	Nilai	78,00	Triwulan I	19,5%
					Triwulan II	19,5%
					Triwulan III	19,5%
					Triwulan IV	19,5%

Sumber : Renstra Dinas KUKM Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2023-2026

Pada tahun 2023, Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung melaksanakan reviu Perjanjian Kinerja Tahun 2023. Reviu dilakukan karena adanya *refocusing* kegiatan dan realokasi anggaran serta telah ditetapkan Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Tahun 2023 dan Revisi Renstra 2023-2026 sebagai upaya untuk penyesuaian terhadap Kepmendagri No 900.1.15.5-317 Tahun 2023 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi pemuktahiran Kodefikasi Klasifikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Daerah, sehingga perlu melakukan penyesuaian pada terhadap sub kegiatan yang ada dan Target Perjanjian Kinerja Tahun 2023.

# BAB 3

## Akuntabilitas Kinerja

### **Bab 3 Berisi :**

1. *Capaian Kinerja Tahun 2022*
2. *Realisasi Anggaran*
3. *Inovasi*
4. *Lintas Sektor*

### **3.1 Capaian Kinerja Tahun 2023**

Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung telah melaksanakan pengukuran kinerja atas kinerja yang diperjanjikan Kepala Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dengan Bapak Gubernur Kepulauan Bangka Belitung tahun 2023. Pengukuran mengacu Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah dengan skala nilai peringkat kinerja sebagaimana tabel berikut:

**Tabel III.1. Skala Nilai Peringkat Kinerja**

No.	Interval Nilai Realisasi Kinerja	Kriteria Penilaian Realisasi Kinerja	KRITERIA Kode
1.	$91 \leq 100$	Sangat Baik	Hijau Tua
2.	$76 \leq 90$	Tinggi	Hijau Muda
3.	$66 \leq 75$	Sedang	Kuning Tua
4.	$51 \leq 65$	Rendah	Kuning Muda
5.	$\leq 50$	Sangat Rendah	Merah

❖ Sumber: Permendagri Nomor 86 Tahun 2017

**Tabel III.2. Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2023**

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR/META INDIKATOR	SATUAN	BASE LINE 2017	CAPAIAN 2022	TAHUN 2023				TARGET AKHIR
						TARGET	REALISASI	PERSENTASE	KRITERIA /KODE	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Meningkatnya Pertumbuhan Koperasi	Persentase pertumbuhan koperasi	%		17,24%	17,65%	17,65%	100%		17,25%
		$\frac{(\text{Jumlah Koperasi Tahun 2022} - \text{Jumlah Koperasi Tahun 2021}) \times 100\%}{\text{Jumlah Koperasi Tahun 2021}}$								
2	Meningkatnya Pertumbuhan UKM	Persentase pertumbuhan UKM	%		10,61%	0.53%	3,57%	100%		0.61%
		$\frac{(\text{Jumlah Usaha Kecil Tahun 2022} - \text{Jumlah Usaha Kecil Tahun 2021}) \times 100\%}{\text{Jumlah Usaha Kecil Tahun 2021}}$								
3	Meningkatnya Kualitas SDM KUKM	Persentase SDM KUKM yang terlatih	%		0,217	0,304%	0,314	100%		0,369%
		$\frac{\text{Jumlah SDM KUKM yang bersertifikat} \times 100\%}{\text{Jumlah SDM KUKM seluruhnya}}$								

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR/META INDIKATOR	SATUAN	BASE LINE 2017	CAPAIAN 2022	TAHUN 2023				TARGET AKHIR
						TARGET	REALISASI	PERSENTASE	KRITERIA /KODE	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
4	Meningkatkan tata kelola Pemerintahan	Nilai Capaian Kinerja Perangkat Daerah (DKUKM)	%		81,06	78%				78,85
		Nilai Raport Kinerja Daerah								


Adapun analisis capaian kinerja sasaran strategis diuraikan sebagai berikut:

### 3.1.1. Sasaran Kinerja :

Kinerja sasaran 1. Meningkatnya Pertumbuhan Koperasi diukur dengan indikator Persentase pertumbuhan koperasi; 2. Meningkatnya Pertumbuhan UKM diukur dengan indikator Persentase pertumbuhan UKM; 3. Meningkatnya Kualitas SDM KUKM diukur dengan indikator Persentase SDM KUKM yang terlatih; dan 4. Meningkatkan tata kelola Pemerintahan diukur dengan indikator Nilai Reformasi Birokrasi (RB) Perangkat Daerah. Penjelasan hubungan sasaran, indikator dan formulasi perhitungan indikator adalah sebagai berikut:

**Tabel III.3. Rumusan Indikator dan Formulasi Perhitungan**

No	Sasaran	Indikator	Formulasi Perhitungan
1	2	3	4
1	Meningkatnya Pertumbuhan Koperasi	Persentase pertumbuhan koperasi	$\frac{(\text{Jumlah Koperasi Tahun 2023} - \text{Jumlah Koperasi Tahun 2022}) \times 100\%}{\text{Jumlah Koperasi Tahun 2022}}$
2	Meningkatnya Pertumbuhan UKM	Persentase pertumbuhan UKM	$\frac{(\text{Jumlah Usaha Kecil Tahun 2023} - \text{Jumlah Usaha Kecil Tahun 2022}) \times 100\%}{\text{Jumlah Usaha Kecil Tahun 2022}}$
3	Meningkatnya Kualitas SDM KUKM	Persentase SDM KUKM yang terlatih	$\frac{\text{Jumlah SDM KUKM yang bersertifikat} \times 100\%}{\text{Jumlah SDM KUKM seluruhnya}}$
4	Meningkatkan tata kelola Pemerintahan	Nilai Capaian Kinerja Perangkat Daerah (DKUKM)	Nilai Raport Kinerja Perangkat Daerah



Kinerja sasaran 1. Meningkatnya Pertumbuhan Koperasi diukur dengan indikator Persentase pertumbuhan koperasi Tahun 2023 capaian kinerja sasaran ini adalah 17,65% dari target 17,65%; 2. Meningkatnya Pertumbuhan UKM diukur dengan indikator Persentase pertumbuhan UKM Tahun 2023 capaian kinerja sasaran ini adalah 3,57% dari target 0,53%; 3. Meningkatnya Kualitas SDM KUKM diukur dengan indikator Persentase SDM KUKM yang terlatih tahun 2023 capaian kinerja sasaran ini adalah 0,314 dari target 0,304%. Sumber data diolah dari hasil perhitungan atas kinerja masing-masing program pendukung sasaran Perangkat Daerah.

Kinerja Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah pada tahun 2023 dapat digambarkan sebagai berikut:

Tabel III.4. Rumusan Indikator dan Formulasi Perhitungan

NO	INDIKATOR/ META INDIKATOR	REALISASI 2022	TAHUN 2023			TARGET AKHIR RENSTRA 2023	CAPAIAN SD 2023 TERHADAP TARGET 2023 (%)
			TARGET	REALISASI	% CAPAIAN		
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Persentase pertumbuhan koperasi	17,24%	17,65%	17,65%	100%	17,65	100%
	$\frac{(\text{Jumlah Koperasi Tahun 2023} - \text{Jumlah Koperasi Tahun 2022}) \times 100\%}{\text{Jumlah Koperasi Tahun 2022}}$						
2	Persentase pertumbuhan UKM	10,61%	0.53%	3,57%	100%	0.61	100%
	$\frac{(\text{Jumlah Usaha Kecil Tahun 2023} - \text{Jumlah Usaha Kecil Tahun 2022}) \times 100\%}{\text{Jumlah Usaha Kecil Tahun 2022}}$						
3	Persentase SDM KUKM yang terlatih	0,217%	0,304%	0,314%	100%	0,304	100%
	$\frac{\text{Jumlah SDM KUKM yang bersertifikat} \times 100\%}{\text{Jumlah SDM KUKM seluruhnya}}$						
4	Nilai Capaian Kinerja Perangkat Daerah (DKUKM)	81,06	78			78	
	Nilai Raport Kinerja Perangkat Daerah						

Analisis Ketercapaian Sasaran Meningkatnya Pertumbuhan Koperasi adalah sebagai berikut:

- a. Tercapai 17,65%, dengan demikian prosentase realisasi terhadap target sebesar 100%, tercapai.
- b. Dibandingkan realisasi tahun lalu sebesar 17,24%, terhadap target tahun lalu sebesar 15,25% terdapat peningkatan sebesar 113,05%
- c. Dibandingkan dengan target akhir RENSTRA, diproyeksikan sasaran akan berhasil tercapai.

Keberhasilan capaian Indikator Persentase peningkatan capaian tersebut didukung dari program-program sebagai berikut :

1. Program Pelayanan Izin Usaha Simpan Pinjam dengan sasaran program meningkatnya Koperasi simpan pinjam yang difasilitasi mempunyai Indikator persentase izin usaha simpan pinjam yang difasilitasi dengan formula perhitungan indikator ini adalah Jumlah izin usaha simpan pinjam yang difasilitasi dibagi jumlah koperasi simpan pinjam yang ada dikali seratus persen Capaian kinerja untuk indikator ini adalah  $(5/75) \times 100\% = 6,67\%$  dari target 2% atau sebesar 100%. Capaian ini didukung oleh Kegiatan Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi dan Kegiatan Penerbitan Izin Usaha Simpan Pinjam Untuk Koperasi Dengan Wilayah Keanggotaan Lintas Daerah Kabupaten/Kota Dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi.
2. Program Pengawasan dan Pemeriksaan Koperasi dengan sasaran program meningkatnya Koperasi yang diawasi dan diperiksa mempunyai Indikator persentase Koperasi yang diawasi dan diperiksa formula perhitungan indikator ini adalah Jumlah Koperasi yang diperiksa dan diawasi dibagi jumlah koperasi Provinsi dikali seratus persen Capaian kinerja untuk indikator ini adalah  $(35/98) \times 100\% = 35,71\%$  dari target 20% atau sebesar 100%. Capaian ini didukung oleh Kegiatan Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi

yang Wilayah Keanggotaannya Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi dan Kegiatan Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi kemudian dihitung rerata valliditas setiap parameter tersebut dalam persen.

3. Program Penilaian Kesehatan KSP/USP Koperasi dengan sasaran program meningkatnya Koperasi yang sehat mempunyai Indikator Persentase Koperasi yang sehat formula perhitungan indikator ini adalah jumlah koperasi sehat dibagi jumlah koperasi Provinsi dikali 100%. Capaian indikator kinerja adalah  $(17/75) \times 100\% = 22,67\%$  dari target sebesar 10%. Capaian ini didukung oleh Kegiatan Penilaian Kesehatan Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi Kemudian dihitung rerata valliditas setiap parameter tersebut dalam persen.
4. Program Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi dengan sasaran program meningkatnya Koperasi yang diberdayakan mempunyai Indikator Persentase Koperasi yang diberdayakan formula perhitungan indikator ini adalah jumlah koperasi yang diberdayakan dibagi jumlah koperasi Provinsi dikali 100%. Capaian indikator kinerja adalah  $(12/98) \times 100\% = 12,24\%$  dari target sebesar 5%. Capaian ini didukung oleh Kegiatan Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi yang Keanggotaannya Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi Kemudian dihitung rerata valliditas setiap parameter tersebut dalam persen.

**Tabel III.5. Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2023**

NO	INDIKATOR/FORMULA INDIKATOR	TARGET	REALISASI	PERSentase
1	2	3	4	5
1	Persentase pertumbuhan koperasi	17,65	17,65	100
	$\frac{(\text{Jumlah Koperasi Tahun 2022} - \text{Jumlah Koperasi Tahun 2021}) \times 100\%}{\text{Jumlah Koperasi Tahun 2021}}$			
2	Persentase pertumbuhan UKM	0,53	3,57	100
	$\frac{(\text{Jumlah Usaha Kecil Tahun 2022} - \text{Jumlah Usaha Kecil Tahun 2021}) \times 100\%}{\text{Jumlah Usaha Kecil Tahun 2021}}$			
3	Persentase SDM KUKM yang terlatih	0,304	0,314	100
	$\frac{\text{Jumlah SDM KUKM yang bersertifikat} \times 100\%}{\text{Jumlah SDM KUKM seluruhnya}}$			
4	Nilai Reformasi Birokrasi (RB) Perangkat Daerah	78		
	Nilai RB			

**DOKUMENTASI PELAKSANAAN KEGIATAN TAHUN 2023**

No.	Dokumentasi Pelaksanaan Kegiatan	Keterangan
1.		Kegiatan Penyerahan bantuan peralatan pendukung produksi dan digitalisasi

2.		Kegiatan Penilaian Koperasi sehat
3		Kegiatan Fasilitas penerbitan NIB

### Faktor Pendukung keberhasilan

- Adanya regulasi dan kebijakan Nasional/Daerah terkait urusan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah dari Pemerintah Pusat maupun Daerah yang mampumengakomodir setiap program kegiatan yang dilaksanakan.
- Adanya Koordinasi yang baik antar pemangku kepentingan baik pusat maupun daerah sehingga program kegiatan dapat dilaksanakan dengan baik.
- Adanya dukungan anggaran baik melalui APBD maupun APBN walaupun adanya refocusing anggaran.
- Ketersediaan dukungan sarana prasarana serta pihak-pihak terkait dalam pemanfaatan teknologi informasi.



### **Faktor Penghambat keberhasilan**

- a. Terlambatnya pengesahan APBD perubahan, sehingga banyak kegiatan yang akan dilaksanakan menjadi tertunda dan tidak dapat dilaksanakan.
- b. Beberapa program kegiatan tidak dapat dilaksanakan secara maksimal karena adanya refocusing anggaran yang sering terjadi.
- c. Adanya kebijakan pemerintah pusat tentang moratorium jabatan fungsional

### **3.2 Efisiensi Anggaran**

Anggaran dan realisasi belanja langsung tahun 2023 yang dialokasikan untuk membiayai program/kegiatan dalam pencapaian sasaran disajikan pada tabel berikut:

**Tabel III.6. Anggaran dan Realisasi Belanja Langsung per Sasaran Tahun 2023**

No	Sasaran	Indikator	Kinerja			Anggaran			Efisiensi
			Target	Realisasi	% Realisasi	Target (Rp)	Realisasi (Rp)	% Realisasi	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	Meningkatnya pertumbuhan Koperasi	Persentase pertumbuhan koperasi	17,65%	17,65%	100%	554.506.800	525.971.660	94,85%	28.535.140
2.	Meningkatnya pertumbuhan UKM	Persentase pertumbuhan UKM	0,53%	3,57%	100%	8.060.592.852	6.989.722.313	86,71%	1.070.870.539
3.	Meningkatnya kualitas SDM KUKM	Persentase SDM KUKM yang berkualitas	0,304%	0,314%	100%	2.981.212.800	2.895.243.692	97,12%	85.969.108

No	Sasaran	Indikator	Kinerja			Anggaran			Efisiensi
			Target	Realisasi	% Realisasi	Target (Rp)	Realisasi (Rp)	% Realisasi	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
4.	Meningkatkan tata kelola Pemerintahan	Nilai Reformasi Birokrasi (RB) Perangkat Daerah	78			12.711.800.878	12.258.737.099	96,44%	453.063.779
<b>Total Belanja</b>						<b>24.308.113.330</b>	<b>22.669.674.764</b>	<b>93,26%</b>	<b>1.638.438.566</b>

**Sumber:** *http: SIPD, Dokumen Pelaksanaan Anggaran Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2023, Laporan Keuangan Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung 2023*

Berdasarkan tabel III.6 di atas capaian kinerja sasaran Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung melampaui target kinerja tahun 2023 dengan target anggaran belanja program/kegiatan yang terkait langsung pada pencapaian sasaran sebesar Rp **24.308.113.330**, terealisasi Rp **22.669.674.764** atau **93,26%** sehingga dapat dikatakan terdapat efisiensi Rp **1.638.438.566** atau 6,74% yang bersumber dari:

- Sisa Belanja DID tahap 1 dan tahap 2 sebagai upaya penanggulangan dampak inflasi daerah yang turun pada bulan Oktober 2022.
- Efisiensi belanja perjalanan dinas sesuai dengan hasil evaluasi dari Kemendagri.
- Efisiensi honor narasumber yang tidak terbayar.

### **3.3 Inovasi**

Tantangan global penyelenggaraan pemerintahan menuntut aparatur untuk bergerak dinamis dan kreatif. Permasalahan dan Keterbatasan sumber daya harus dipandang sebagai pemicu gagasan dan ide kreatif yang dapat memberikan manfaat bagi masyarakat baik secara langsung maupun tidak langsung. Maka inovasi yang telah dikembangkan dalam pencapaian sasaran kinerja antara lain:

- a. Si Dulang Babel, untuk memudahkan penyediaan data lengkap UMKM di provinsi Kepulauan Bangka Belitung.
- b. UMKM Bangkit, sebagai gerakan pemberdayaan dan pengembangan UMKM mulai dari kelembagaan, pendataan, standarisasi produk dan pendampingan pelaku UMKM dan Koperasi
- c. Siwaskop (Sistem Informasi dan Pengawasan Koperasi), yang terdiri dari sistem informasi seputar data dan kegiatan koperasi, kesehatan koperasi dan pemberdayaan koperasi.

### **3.4 Penghargaan**

Sepanjang Tahun 2023 Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung telah berhasil mendapat penghargaan sebagai berikut :

- a. Piagam Penghargaan atas Peran dan Partisipasi sebagai “SPONSORSHIP” Kegiatan Tradisi KORPS IKAPTK Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2023 yang diberikan oleh Gubernur Kepulauan

Bangka Belitung dan DPP IKAPTK Kepulauan Bangka Belitung

- b. Juara Favorit 1 sebagai Stand Terbaik pada penyelenggaraan Pameran Hari Koperasi Nasional Ke-76 Tahun 2023 (HARKOPNAS EXPO 2023) yang diberikan oleh Dewan Koperasi Indonesia (DEKOPIN)
- c. Perangkat Daerah dengan Predikat “Informatif” (Kategori Badan Publik OPD Provinsi) pada pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi (MONEV) Keterbukaan Informasi Badan Publik Tahun 2023 se-Bangka Belitung yang diberikan oleh Komisi Informasi Provinsi Kepulauan Bangka Belitung

# BAB 4

## Penutup

### **Bab 4 Berisi :**

1. *Kesimpulan*
2. *Rekomendasi Peningkatan kinerja*

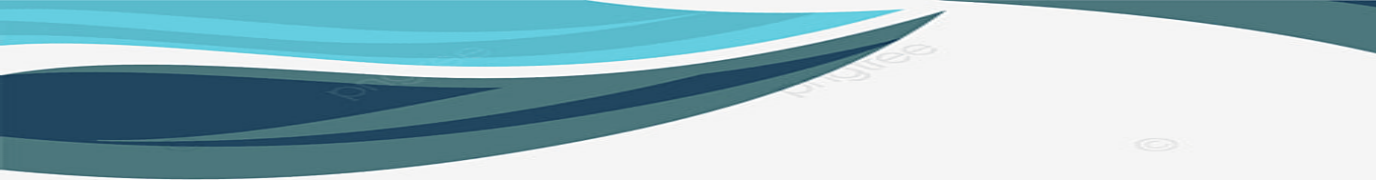
Hasil laporan kinerja Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2023 dapat disimpulkan sebagai berikut:

Permasalahan yang dihadapi saat ini dalam rangka mencapai indikator kinerja utama adalah sebagai berikut:

1. Rendahnya Kualitas SDM Koperasi dan UKM
2. Kurang optimalnya kelembagaan dan pengawasan bagi KUKM
3. Belum maksimalnya penggunaan kredit pembiayaan oleh KUKM
4. Belum tersedianya informasi layanan perbankan / lembaga keuangan yang dimanfaatkan Koperasi dan UKM yang memadai
5. Rendahnya ketersediaan dan akurasi data KUKM
6. Rendahnya akses informasi perkoperasian dan UKM

Faktor kunci keberhasilan capaian kinerja Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2023 adalah:

1. Komitmen yang kuat seluruh pegawai Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung untuk mewujudkan sasaran Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.
2. Koordinasi internal yang berjalan dengan baik. Koordinasi internal Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dilakukan secara berkala dan dikemas dalam acara *Coffee Morning*.
3. Koordinasi yang baik antar pemangku kepentingan baik pusat maupun daerah sehingga program kegiatan dapat dilaksanakan dengan baik.



Adapun langkah-langkah perbaikan ke depan sebagai berikut:

1. Tetap melakukan koordinasi, kolaborasi dan sinergitas dengan Kementerian Koperasi dan UMKM, Dinas Koperasi dan UMKM Kabupaten Kota, serta mitra UMKM dan para Stakeholder lainnya;
2. Memaksimalkan tenaga Pendamping UMKM, Konsultan PLUT dan PPKL dalam melakukan pembinaan terhadap para pelaku UMKM dan Pengurus Koperasi;
3. Selanjutnya untuk melakukan pengendalian evaluasi terkait capaian sasaran dan program kerja sebagai bahan penentuan kebijakan yang tepat di tahun ke depan.;
4. Memaksimalkan dukungan anggaran baik dari APBD maupun APBN (dekon/DAK/DID) untuk mencapai sasaran yang telah ditetapkan;



# LAMPIRAN

*Lampiran 1. Perencanaan Strategis (matriks Renstra lima tahun)*

Tujuan dan Sasaran Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi  
Kepulauan Bangka Belitung  
Tahun 2023 - 2026

No.	Tujuan	Sasaran	Indikator	Target Capaian Tahun			
				2023	2024	2025	2026
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1.	Meningkatnya kesempatan kerja	Meningkatnya pertumbuhan Koperasi	Persentase pertumbuhan koperasi	17.65%	16.67%	16.95%	17.25%
		Meningkatnya pertumbuhan UKM	Persentase pertumbuhan UKM	0.53%	0.56%	0.59%	0.61%
		Meningkatnya kualitas SDM KUKM	Persentase SDM KUKM yang berkualitas	0.304%	0.325%	0.347%	0.369%
		Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan	Nilai Capaian Kinerja Perangkat Daerah	78.00	78.05	78.45	78.85

## Lampiran 2. Perjanjian Kinerja Perubahan Tahun 2023



### PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2023

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : RIZA ARYANI, S. Sos., M.Si  
Jabatan : Plt. Kepala Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah  
Provinsi Kepulauan Bangka Belitung

Selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA

Nama : Dr. SAFRIZAL ZA, M.Si.  
Jabatan : Selaku atasan langsung PIHAK PERTAMA

Selanjutnya disebut PIHAK KEDUA

PIHAK PERTAMA berjanji akan mewujudkan target kinerja tahunan sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

PIHAK KEDUA akan memberikan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi akuntabilitas kinerja terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Pangkalpinang, November 2023

PIHAK KEDUA  
Pj. GUBERNUR  
KEPULAUAN BANGKA BELITUNG

Dr. SAFRIZAL ZA, M. Si

PIHAK PERTAMA  
Plt. KEPALA DINAS  
KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH  
PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG



RIZA ARYANI, S. Sos., M.Si  
Pembina Tk. I  
NIP. 19750130 200212 2 006

**PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2023  
DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH  
PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG**

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Formula Penghitungan Target
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.	Meningkatkan tata kelola Pemerintahan	Nilai Reformasi Birokrasi (RB) Perangkat Daerah	80.5%	Penilaian Reformasi Birokrasi (RB)
2.	Meningkatnya Penciptaan Lapangan Kerja pada Sektor Koperasi dan UKM	Persentase pertumbuhan koperasi	17.65%	$\frac{\text{Jumlah Koperasi (t)} - \text{Jumlah koperasi (t-1)}}{\text{Jumlah koperasi (t-1)}} \times 100 \%$
		Persentase pertumbuhan UKM	0.53%	$\frac{\text{Jumlah Usaha Kecil (t)} - \text{Jumlah Usaha Kecil (t-1)}}{\text{Jumlah Usaha Kecil (t-1)}} \times 100 \%$
		Persentase SDM KUKM yang terlatih	0.304%	$\frac{\text{Jumlah SDM KUKM yang bersertifikat}}{\text{Jumlah SDM KUKM seluruhnya}} \times 100 \%$

Anggaran :

No	Indikator Kinerja	Program	Anggaran	Keterangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.	Nilai Reformasi Birokrasi (RB) Perangkat Daerah	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi (Dinas)	12.513.317.858,-	
		Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi (UPT Balaikop)	198.483.020,-	
2.	Persentase pertumbuhan koperasi	Program Pelayanan Izin Usaha Simpan Pinjam	33.999.800,-	
		Program Pengawasan dan Pemeriksaan Koperasi	99.746.000,-	

No	Indikator Kinerja	Program	Anggaran	Keterangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
		Program Penilaian Kesehatan KSP/USP Koperasi	73.999.500,-	
		Program Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi	346.761.500,-	
3.	Persentase pertumbuhan UKM	Program Pemberdayaan UMKM	2.781.997.092,-	
		Program Pengembangan UMKM	5.278.595.760,-	
4.	Persentase SDM KUKM yang terlatih	Program Pendidikan dan Latihan Perkoperasian	2.981.212.800,-	

Pangkalpinang, November 2023

PIHAK KEDUA  
Pj. GUBERNUR  
KEPULAUAN BANGKA BELITUNG

Dr. SARRIZAL ZA, M. Si

PIHAK PERTAMA  
Pit. KEPALA DINAS  
KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH  
PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG



RIZA ARYANI, S. Sos., M.Si  
Pembina Tk. I  
NIP. 19750130 200212 2 006

*Lampiran 3. Evaluasi LKj IP Tahun 2022*



**PEMERINTAH PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG**  
**INSPEKTORAT DAERAH**

KOMPLEKS PERKANTORAN DAN PERUMAHAN PEMERINTAH PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG  
KEC. BUKIT INTAN KEL. AIR ITAM TEL/FAX. (0717) 434693, 439313 – PANGKALPINANG

---

**LAPORAN HASIL PEMERIKSAAN**

**LAPORAN HASIL EVALUASI**  
**AKUNTABILITAS KINERJA INTANSI PEMERINTAH (AKIP)**  
**TAHUN 2022 PADA**  
**DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH**  
**PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG**

NOMOR : 700/158/LHE/ITDA/2023  
TANGGAL : 27 JUNI 2023



## PEMERINTAH PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG INSPEKTORAT DAERAH

KOMPLEK PERKANTORAN DAN PERMUKIMAN TERPADU PEMERINTAH PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG  
JL. PULAU BELITUNG KEL. AIR ITAM TELP. (0717) 499113 FAX 434093

Pangkalpinang, 27 Juni 2023

Nomor : 700/158 /LHE/ITDA/2023  
Sifat : Rahasia  
Lampiran : -  
Hal : Laporan Hasil Evaluasi  
Akuntabilitas Kinerja Instansi  
Pemerintah (AKIP) Tahun 2022.

Yth. Kepala Dinas Koperasi, Usaha  
Kecil dan Menengah Provinsi  
Kepulauan Bangka Belitung  
di -  
Pangkalpinang

Berdasarkan surat tugas Inspektur a.n. Gubernur Kepulauan Bangka Belitung Nomor 700/4/EVA-ITDA/2023 tanggal 31 Maret 2023 hal melaksanakan Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah pada Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah, Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang dan Perumahan Rakyat Kawasan Permukiman, Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, dengan ini kami sampaikan hasil evaluasi AKIP Tahun 2022 pada Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dengan uraian sebagai berikut:

### 1. Pendahuluan

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP), kami telah melakukan evaluasi akuntabilitas kinerja pada Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Pelaksanaan evaluasi tahun 2022 berpedoman pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

Tujuan evaluasi AKIP adalah untuk mengetahui sejauhmana AKIP dilaksanakan dalam mendorong peningkatan pencapaian kinerja yang tepat sasaran dan berorientasi hasil (*result oriented government*). Secara khusus evaluasi AKIP bertujuan untuk :

- Memperoleh informasi mengenai implementasi SAKIP;
- Menilai tingkat implementasi SAKIP;
- Menilai tingkat akuntabilitas kinerja;
- Memberikan saran perbaikan untuk peningkatan AKIP; dan
- Memonitor tindak lanjut rekomendasi hasil evaluasi periode sebelumnya.

Ruang lingkup evaluasi AKIP meliputi penilaian kualitas perencanaan kinerja, penilaian pengukuran kinerja berjenjang dan berkelanjutan, penilaian pelaporan kinerja, penilaian evaluasi akuntabilitas kinerja internal, dan penilaian capaian kinerja atas output maupun outcome serta kinerja lainnya pada level pemerintah daerah maupun perangkat daerah.

Pelaksanaan evaluasi AKIP menggunakan kombinasi metodologi kualitatif dan kuantitatif dengan mempertimbangkan kepraktisan dan kemanfaatan yang disesuaikan dengan tujuan evaluasi serta mempertimbangkan kendala yang ada. Langkah praktis diambil agar lebih cepat memberikan petunjuk untuk perbaikan implementasi SAKIP, sehingga dapat menghasilkan rekomendasi untuk meningkatkan akuntabilitas kinerja.

## 2. Tindak Lanjut Hasil Evaluasi Tahun Sebelumnya

Berdasarkan informasi yang disampaikan, Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung telah menindaklanjuti sebagian rekomendasi hasil evaluasi AKIP tahun sebelumnya yaitu informasi kinerja dalam laporan kinerja dapat diandalkan dan digunakan untuk peningkatan dan penilaian kinerja.

## 3. Hasil Evaluasi

Hasil evaluasi atas akuntabilitas kinerja Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah menunjukkan nilai sebesar 76,36 dengan predikat BB. Hal tersebut menunjukkan bahwa implementasi akuntabilitas kinerja 'Sangat Baik', yaitu terdapat gambaran bahwa AKIP sangat baik pada 2/3 unit kerja. Akuntabilitas yang sangat baik ditandai dengan mulai terwujudnya efisiensi penggunaan anggaran dalam mencapai kinerja, memiliki sistem manajemen kinerja yang andal dan berbasis teknologi informasi, serta pengukuran kinerja telah dilakukan sampai ke level eselon 3/ koordinator. Rincian hasil evaluasi tersebut adalah sebagai berikut:

No.	Komponen Yang Dinilai	Bobot	Nilai
1.	Perencanaan Kinerja	30	24,60
2.	Pengukuran Kinerja	30	24,00
3.	Pelaporan Kinerja	15	11,25
4.	Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal	25	16,50
Nilai Hasil Evaluasi		100	76,36
Tingkat Akuntabilitas Kinerja			BB

Hasil evaluasi tahun 2022 "tidak diperbandingkan" dengan hasil evaluasi tahun sebelumnya, karena berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, terdapat perubahan bobot komponen dan sub komponen serta kriteria

penilaiannya. Evaluasi tahun ini lebih menitikberatkan pada implementasi akuntabilitas kinerja pada level perangkat daerah.

Penjelasan lebih lanjut atas hasil evaluasi akuntabilitas kinerja pada Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2022 sebagai berikut:

1) Pelaporan Kinerja

Hasil evaluasi atas Pelaporan Kinerja pada Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung telah menyusun laporan kinerja dan telah di publikasikan melalui website Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, namun masih terdapat hal-hal yang harus mendapat perhatian, yaitu:

- a. Informasi dalam laporan kinerja hanya sebagian menjadi perhatian utama pimpinan (Bertanggung Jawab).
- b. Penyajian informasi dalam laporan kinerja menjadi kepedulian hanya bagi sebagian pegawai.
- c. Informasi dalam laporan kinerja berkala hanya sebagian telah digunakan dalam penyesuaian aktivitas untuk mencapai kinerja. (LKE terlampir)

2) Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal

Hasil evaluasi atas evaluasi akuntabilitas kinerja internal telah dilaksanakan namun masih terdapat hal-hal yang perlu mendapat perhatian yaitu:

- a. Masih minimalnya pedoman teknis Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal, Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal baru sedikit dilaksanakan, dan Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal baru sebagian kecil dilaksanakan secara berjenjang.
- b. Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal baru sebagian dilaksanakan menggunakan Teknologi Informasi (Aplikasi).
- c. Baru sebagian terjadi peningkatan implementasi SAKIP dengan melaksanakan tindak lanjut atas rekomendasi hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal, hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal baru sebagian dimanfaatkan untuk perbaikan dan peningkatan akuntabilitas kinerja, hasil dari Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal baru sebagian dimanfaatkan dalam mendukung efektifitas dan efisiensi kinerja, adanya perbaikan dan peningkatan sebagian kinerja dengan memanfaatkan hasil evaluasi akuntabilitas kinerja internal. (LKE terlampir)

4. Rekomendasi

Berdasarkan uraian di atas serta dalam rangka lebih mengefektifkan penerapan akuntabilitas kinerja, kami merekomendasikan beberapa hal sebagai berikut:

- a. Perlu adanya perhatian sepenuhnya dari pimpinan OPD dan seluruh pegawai dalam rangka peningkatan kinerja pemerintahan pada Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung atas penyajian informasi dalam laporan SAKIP OPD.

- b. Perlu adanya peningkatan pedoman teknis Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal, antara lain membuat Pedoman Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal sesuai standar.
- c. Pelaksanaan Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal yang dilaksanakan menggunakan Teknologi Informasi (Aplikasi) perlu ditingkatkan.

Demikian disampaikan hasil evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) sebagai penerapan manajemen kinerja. Kami menghargai upaya yang telah dilakukan dalam implementasi SAKIP pada Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Terhadap hasil evaluasi yang telah disampaikan, kami mengharapkan agar Saudara beserta seluruh jajaran memberikan perhatian yang besar pada upaya implementasi SAKIP dan menindaklanjuti rekomendasi yang telah kami sampaikan.

Atas perhatian dan kerjasama Saudara diucapkan terima kasih.

INSPEKTUR  
PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG,  
  
SUSANTO  
Pembina Utama Madya  
NIP 1963061211985031001

Tembusan:

- 1) Menteri PAN dan RB;
- 2) Gubernur Kepulauan Bangka Belitung.

**HASIL EVALUASI AKUNTABILITAS KINERJA  
DINAS KOPERASI USAHA MIKRO, KECIL DAN MENENGAH  
TAHUN 2022**

No	Komponen/Sub Komponen/Kriteria	Bobot	Nilai Akuntabilitas Kinerja	
			2021	2022
1	Perencanaan Kinerja	30,00		24,60
2	Pengukuran Kinerja	30,00		24,00
3	Pelaporan Kinerja	15,00		11,25
4	Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal	25,00		16,50
Nilai Akuntabilitas Kinerja			Belum Input	76,36
			AA	BB

No	Catatan
1	Hasil evaluasi atas Pelaporan Kinerja pada Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung telah menyusun laporan kinerja dan telah di publikasikan melalui website Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, namun masih terdapat hal-hal yang harus mendapat perhatian, yaitu: a. Informasi dalam laporan kinerja hanya sebagian menjadi perhatian utama pimpinan (Bertanggung Jawab). b. Penyajian informasi dalam laporan kinerja menjadi kepedulian hanya bagi sebagian pegawai. c. Informasi dalam laporan kinerja berkala hanya sebagian telah digunakan dalam penyesuaian aktivitas untuk mencapai kinerja.
2	Hasil evaluasi atas evaluasi akuntabilitas kinerja internal telah dilaksanakan namun masih terdapat hal-hal yang perlu mendapat perhatian yaitu: a. Masih minimalnya pedoman teknis Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal, Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal baru sedikit dilaksanakan, dan Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal baru sebagian kecil dilaksanakan secara berjenjang. b. Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal baru sebagian dilaksanakan menggunakan Teknologi Informasi (Aplikasi). c. Baru sebagian terjadi peningkatan implementasi SAKIP dengan melaksanakan tindak lanjut atas rekomendasi hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal, hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal baru sebagian dimanfaatkan untuk perbaikan dan peningkatan akuntabilitas kinerja, hasil dari Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal baru sebagian dimanfaatkan dalam mendukung efektivitas dan efisiensi kinerja, adanya perbaikan dan peningkatan sebagian kinerja dengan memanfaatkan hasil evaluasi akuntabilitas kinerja internal.

No	Rekomendasi
1	Perlu adanya perhatian sepenuhnya dari pimpinan OPD dan seluruh pegawai dalam rangka peningkatan kinerja pemerintahan pada Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung atas penyajian informasi dalam laporan SAKIP OPD.
2	Perlu adanya peningkatan pedoman teknis Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal, antara lain membuat Pedoman Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal sesuai standar.
3	Pelaksanaan Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal yang dilaksanakan menggunakan Teknologi Informasi (Aplikasi) perlu ditingkatkan.

No	Komponen/Sub Komponen/Kriteria	Bobot	Unit Kerja			
			Jawaban	Nilai	Jawaban	Nilai
1	<b>PERENCANAAN KINERJA</b>	30,00		24,6		%
1.a	Dokumen Perencanaan kinerja telah tersedia	6,00	A	5,4		
Kriteria:						
1	Terdapat pedoman teknis perencanaan kinerja.			BB		80
2	Terdapat dokumen perencanaan kinerja jangka Panjang			BB		80
3	Terdapat dokumen perencanaan kinerja jangka Menengah			BB		80
4	Terdapat dokumen perencanaan kinerja jangka Pendek			BB		80
5	Terdapat dokumen perencanaan aktifitas yang mendukung kinerja.			BB		80
6	Terdapat dokumen perencanaan anggaran yang mendukung kinerja				BB	80
1.b	Dokumen Perencanaan kinerja telah memenuhi standar yang baik, yaitu untuk mencapai hasil, dengan ukuran kinerja yang SMART, menggunakan penyalarsan (cascading) disetiap level secara logis, serta memperhatikan kinerja bidang lain (crosscutting)	9,00	BB	7,2		
Kriteria:						
1	Dokumen Perencanaan Kinerja telah diformalkan.			BB		80
2	Dokumen Perencanaan Kinerja telah dipublikasikan tepat waktu.			BB		80
3	Dokumen Perencanaan Kinerja telah menggambarkan Kebutuhan atas Kinerja			BB		80
4	Kualitas Rumusan Hasil (Tujuan/Sasaran) telah jelas menggambarkan kondisi			B		70
5	Ukuran Keberhasilan (Indikator Kinerja) telah memenuhi kriteria SMART.			B		70
6	Indikator Kinerja Utama (IKU) telah menggambarkan kondisi Kinerja Utama			BB		80
7	Target yang ditetapkan dalam Perencanaan Kinerja dapat dicapai (achievable).			BB		80
8	Setiap Dokumen Perencanaan Kinerja menggambarkan hubungan yang			B		70
9	Perencanaan kinerja dapat memberikan informasi tentang hubungan kinerja,			B		70
10	Setiap unit/satuan kerja merumuskan dan menetapkan Perencanaan Kinerja.			B		70
11	Setiap pegawai merumuskan dan menetapkan Perencanaan Kinerja.			B		70
1.c	<b>Perencanaan Kinerja telah</b>	15,00	BB	12		
Kriteria:						
1	Anggaran yang ditetapkan telah mengacu pada Kinerja yang ingin dicapai.			BB		80
2	Aktivitas yang dilaksanakan telah mendukung Kinerja yang ingin dicapai.			B		70
3	Target yang ditetapkan dalam Perencanaan Kinerja telah dicapai dengan baik.			BB		80
4	Rencana aksi kinerja dapat berjalan dinamis karena capaian kinerja selalu			B		70
5	Terdapat perbaikan/penyempurnaan Dokumen Perencanaan Kinerja yang			B		70
6	Terdapat perbaikan/penyempurnaan Dokumen Perencanaan Kinerja dalam			B		70
7	Setiap unit/satuan kerja (Sekretariat/Bidang/Bagian) memahami dan peduli.			B		70
8	Setiap Pegawai memahami dan peduli, serta berkomitmen dalam mencapai kinerja yang telah direncanakan.			B		70
2	<b>PENGUKURAN KINERJA</b>	30,00		24		
2.a	Pengukuran Kinerja telah dilakukan	6,00	BB	4,8		
Kriteria:						
1	Terdapat pedoman teknis pengukuran kinerja dan pengumpulan data kinerja.			BB		80
2	Terdapat Definisi Operasional yang jelas atas kinerja dan cara mengukur			B		70

3	Terdapat mekanisme yang jelas terhadap pengumpulan data kinerja yang dapat diandalkan.	B	70	
2.b	Pengukuran Kinerja telah menjadi	9,00	BB	7,2
Kriteria:				
1	Pimpinan selalu terlibat sebagai pengambil keputusan (Decision Maker) dalam	B	70	
2	Data kinerja yang dikumpulkan telah relevan untuk mengukur capaian kinerja	B	70	
3	Data kinerja yang dikumpulkan telah mendukung capaian kinerja yang	B	70	
4	Pengukuran kinerja telah dilakukan secara berkala.	B	70	
5	Setiap level organisasi melakukan pemantauan atas pengukuran capaian	B	70	
6	Pengumpulan data kinerja dan pengukuran capaian kinerja telah memanfaatkan	B	70	
7	Pengukuran capaian kinerja telah memanfaatkan Teknologi Informasi (Aplikasi).	B	70	
2.c	Pengukuran Kinerja telah dijadikan	15,00	BB	12
Kriteria:				
1	Pengukuran Kinerja telah menjadi dasar dalam penyesuaian	BB	80	
2	Pengukuran Kinerja telah menjadi dasar dalam penempatan/penghapusan	B	70	
3	Pengukuran kinerja telah mempengaruhi penyesuaian (Refocusing) Organisasi.	B	70	
4	Pengukuran kinerja telah mempengaruhi penyesuaian Strategi dalam mencapai	B	70	
5	Pengukuran kinerja telah mempengaruhi penyesuaian Kebijakan dalam	B	70	
6	Pengukuran kinerja telah mempengaruhi penyesuaian Aktivitas dalam	B	70	
7	Pengukuran kinerja telah mempengaruhi penyesuaian Anggaran dalam	B	70	
8	Terdapat efisiensi atas penggunaan anggaran dalam mencapai kinerja.	B	70	
9	Setiap unit/satuan kerja memahami dan peduli atas hasil pengukuran kinerja.	B	70	
10	Setiap pegawai memahami dan peduli atas hasil pengukuran kinerja.	B	70	
3	PELAPORAN KINERJA	15,00		11,25
3.a	Terdapat Dokumen Laporan yang	3,00	BB	2,4
Kriteria:				
1	Dokumen Laporan Kinerja telah disusun.	BB	80	
2	Dokumen Laporan Kinerja telah disusun secara berkala.	B	70	
3	Dokumen Laporan Kinerja telah diformalkan.	BB	80	
4	Dokumen Laporan Kinerja telah direvisi.	BB	80	
5	Dokumen Laporan Kinerja telah dipublikasikan.	B	70	
6	Dokumen Laporan Kinerja telah disampaikan tepat waktu.	B	70	
3.b	Dokumen Laporan Kinerja telah	4,50	BB	3,6
Kriteria:				
1	Dokumen Laporan Kinerja disusun secara berkualitas sesuai dengan standar.	B	70	
2	Dokumen Laporan Kinerja telah mengungkap seluruh informasi tentang	B	70	
3	Dokumen Laporan Kinerja telah menginformkan perbandingan realisasi kinerja	B	70	
4	Dokumen Laporan Kinerja telah menginformkan perbandingan realisasi kinerja	B	70	
5	Dokumen Laporan Kinerja telah menginformkan perbandingan realisasi kinerja	B	70	
6	Dokumen Laporan Kinerja telah menginformkan perbandingan realisasi kinerja	B	70	
7	Dokumen Laporan Kinerja telah menginformkan kualitas atas capaian kinerja	B	70	
8	Dokumen Laporan Kinerja telah menginformkan efisiensi atas penggunaan	B	70	
9	Dokumen Laporan Kinerja telah menginformkan upaya perbaikan dan penyempurnaan kinerja ke depan (Rekomendasi perbaikan kinerja).	B	70	
3.c	Pelaporan Kinerja telah memberikan	7,50	B	5,25
Kriteria:				
1	Informasi dalam laporan kinerja selalu menjadi perhatian utama pimpinan	CC	60	
2	Penyajian informasi dalam laporan kinerja menjadi kepedulian seluruh pegawai.	CC	60	
3	Informasi dalam laporan kinerja berkala telah digunakan dalam penyesuaian	CC	60	

4	Informasi dalam laporan kinerja berkala telah digunakan dalam penyesuaian	B	70	
5	Informasi dalam laporan kinerja telah digunakan dalam evaluasi pencapaian	B	70	
6	Informasi dalam laporan kinerja telah digunakan dalam penyesuaian	B	70	
7	Informasi dalam laporan kinerja selalu mempengaruhi perubahan budaya	B	70	
4	<b>EVALUASI AKUNTABILITAS KINERJA</b>	25,00	16,5	
4.a	<b>Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal</b>	5,00	C	2,5
Kriteria:				
1	Terdapat pedoman teknis Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal.	C	50	
2	Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal telah dilaksanakan	C	50	
3	Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal telah dilaksanakan secara berjenjang.	C	50	
4.b	<b>Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal</b>	7,50	B	5,25
Kriteria:				
1	Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal telah dilaksanakan sesuai standar.	B	70	
2	Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal telah dilaksanakan oleh SDM yang	B	70	
3	Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal telah dilaksanakan dengan pendalaman	B	70	
4	Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal telah dilaksanakan.	B	70	
5	Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal telah dilaksanakan menggunakan	CC	60	
4.c	<b>Implementasi SAKIP telah meningkat</b>	12,50	B	8,75
Kriteria:				
1	Seluruh rekomendasi atas hasil evaluasi akuntabilitas kinerja internal telah	B	70	
2	Telah terjadi peningkatan implementasi SAKIP dengan melaksanakan tindak	CC	60	
3	Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal telah dimanfaatkan untuk perbaikan	CC	60	
4	Hasil dari Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal telah dimanfaatkan dalam	CC	60	
5	Telah terjadi perbaikan dan peningkatan kinerja dengan memanfaatkan hasil evaluasi akuntabilitas kinerja internal.	CC	60	

*Lampiran 4. Tanggapan/Tindak Lanjut Evaluasi LKJ IP Tahun 2023*

No	Saran/Rekomendasi	Tindak lanjut
1.	<p>Surat Inspektur Provinsi Kepulauan Bangka Belitung            Nomor : 700/158/LHE/ITDA/2023 tanggal 27 Juni 2023 perihal Laporan Hasil Evaluasi atas Implementasi SAKIP Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung TA. 2022 :</p> <p>Rekomendasi:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Perlu adanya perhatian sepenuhnya dari pimpinan OPD dan seluruh pegawai dalam rangka meningkatkan kinerja pemerintah pada Dinas KUKM Provinsi Kepulauan Bangka Belitung atas penyajian informasi dalam laporan SAKIP OPD</li> <li>2. Perlu adanya peningkatan pedoman teknis Evaluasi akuntabilitas kinerja internal antara lain membuat pedoman evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal sesuai standar</li> <li>3. Pelaksanaan Evaluasi Akuntabilitas Kinerja internal yang dilaksanakan menggunakan teknologi informasi (aplikasi) perlu ditingkatkan</li> </ol>	<p>Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung melakukan berbagai upaya untuk meningkatkan pencapaian target kinerja (output dan outcome) Tahun 2022 dengan langkah-langkah:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Meningkatkan keikutsertaan Pegawai dalam penguatan kapasitas baik yang secara luring maupun daring dan baik dari pemerintah daerah maupun dari luar (swasta).</li> <li>2. Sudah menyiapkan pedoman evaluasi akuntabilitas, dan sudah disampaikan ke Inspektorat Provinsi.</li> <li>3. Memaksimalkan penggunaan aplikasi e-sakip Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.</li> </ol>

*Lampiran 5. SK IKU Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung*



**PEMERINTAH PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG  
DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH**

Jl. Pulau Lepar No. 06, Komplek Perkantoran Pemrov. Kepulauan Bangka Belitung, Kelurahan Air Itam  
Kecamatan Bukit Intan Pangkalpinang, Telp./Fax. (0717) 421743  
Web : kukm.babelprov.go.id Email : kukm@babelprov.go.id

NOMOR : 188/8448/DKUKM/2023

TENTANG

INDIKATOR KINERJA UTAMA PERUBAHAN DINAS KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH  
PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG TAHUN 2023

Plt. KEPALA DINAS KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH  
PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG,

- Menimbang : a. bahwa untuk memaksimalkan pencapaian tujuan dan sasaran strategis Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung tahun 2023, serta untuk perbaikan kinerja dan peningkatan akuntabilitas kinerja Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2023, maka perlu untuk menentukan Kembali target Indikator kinerja Utama (IKU) sampai dengan akhir tahun 2023;
- b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Tentang Indikator Kinerja Utama (IKU) Perubahan Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2023;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 217, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4033;
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5243);
4. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5678);
5. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
6. Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Nomor 3 Tahun 2017 tentang Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2017 Nomor 3 Seri E);
7. Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Nomor 9 Tahun 2020 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung;
8. Peraturan Gubernur Kepulauan Bangka Belitung Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyelenggaraan Sistem Akuntabilitas Kinerja instansi Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Berita Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2019 Nomor 45 Seri E);

9. Peraturan Gubernur Kepulauan Bangka Belitung Nomor : 14 tahun 2022 tentang Rencana Pembangunan Daerah Provinsi kepulauan Bangka Belitung Tahun 2023 – 2026;
10. Peraturan Gubernur Kepulauan Bangka Belitung Nomor 19 Tahun 2022 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2023-2026 (Berita Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2022 Nomor 16 Seri E).

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- KESATU : Menetapkan Indikator Kinerja Utama (IKU) Perubahan Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2023.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul akibat diterbitkannya Keputusan Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2023.
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Pangkalpinang  
pada tanggal 6 November 2023

Plt. KEPALA DINAS  
KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH  
PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG,



Riza Aryani, S.Sos, M.Si  
Pembina TK. I  
NIP 19750130 200212 2 006

Tembusan disampaikan kepada Yth :

1. Sekretaris Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung;
2. Inspektur Provinsi Kepulauan Bangka Belitung di Pangkalpinang;
3. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan dan Penelitian Pengembangan Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung di Pangkalpinang;

LAMPIRAN  
KEPUTUSAN KEPALA DINAS KOPERASI USAHA KECIL DAN  
MENENGAH KEPULAUAN BANGKA BELITUNG  
NOMOR : 188/2448/DKUKM/2023  
TANGGAL : 6 NOVEMBER 2023

INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU) PERUBAHAN  
DINAS KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG TAHUN 2023-2026

NO	SASARAN	INDIKATOR KINERJA SASARAN	KONDISI AWAL	TARGET				Definisi	Formula Perhitungan (rumus menghitung realisasi target)	Penanggung jawab
			Tahun 2022	2023	2024	2025	2026			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Meningkatnya Tata Kelola Pemerintahan	Nilai Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah	B	B				Nilai hasil evaluasi RB SKPD di lingkungan Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dan Tim Penilai RB Pusat dan Daerah	Nilai hasil evaluasi RB SKPD di lingkungan Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dan Tim Penilai RB Pusat dan Daerah	Sekretariat
		Nilai Capaian Kinerja Perangkat Daerah	81.06	78.00	78.05	78.45	78.85	Nilai Hasil evaluasi kinerja Perangkat Daerah	Nilai Hasil evaluasi kinerja Perangkat Daerah yang dirilis setiap tahun	Sekretariat
2	Meningkatnya pertumbuhan Koperasi dan UKM untuk Penciptaan Lapangan Kerja	Persentase pertumbuhan koperasi	17.24%	17.65%	16.67%	16.95%	17.25%	Pertumbuhan tahunan koperasi binaan provinsi yang dihitung berdasarkan pertambahan jumlah koperasi satu tahun dibagi jumlah koperasi tahun sebelumnya	$\frac{\text{Jumlah Koperasi (t)} - \text{Jumlah koperasi (t-1)}}{\text{Jumlah Koperasi (t-1)}} \times 100 \%$	Bidang Koperasi
		Persentase pertumbuhan UKM	10.61%	0.53%	0.56%	0.59%	0.61%	Pertumbuhan tahunan UKM yang dihitung pertambahan UKM satu tahun dibagi jumlah UKM tahun sebelumnya	$\frac{\text{Jumlah Usaha Kecil (t)} - \text{Jumlah Usaha Kecil (t-1)}}{\text{Jumlah Usaha Kecil (t-1)}} \times 100 \%$	Bidang Pemberdayaan UKM dan Bidang Pengembangan UKM
		Persentase SDM KUKM yang berkualitas	0.217	0.304%	0.325%	0.347%	0.369%	Perbandingan Jumlah peserta pengurus koperasi dan UMKM yang ikut pelatihan dibagi jumlah pengurus koperasi dan UMKM tahun sebelumnya	$\frac{\text{Jumlah SDM Koperasi dan UKM yang bersertifikat}}{\text{Jumlah SDM KUKM seluruhnya}} \times 100 \%$	UPTD Balaikoperasi UKM

Plt. KEPALA DINAS  
KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH

Riza Aryani, S.Sos, M.Si  
Pembina TK I

